CATATAN PERJALANAN IJRS 2022

Berkolaborasi Mengawal Kebijakan melalui Advokasi yang Berbasiskan Bukti

#DiscoveringJustice

Tim Penyusun

- Dio Ashar Wicaksana
- Adery Ardhan Saputro
- Bestha Inatsan Ashila
- Dian Saraswati
- Arsa Ilmi Budiarti
- Shofana Sekar Humairoh
- Neka Rusyda Supriatna

Tim Desain

- Umi Kaltsum
- Dyesnisa Rahmanisarie

Pengantar

Ketua Perkumpulan

Nisa Istiani, S.H., M.LI.

Tahun 2022, IJRS menapak perjalanan 4 tahun sebagai lembaga penelitian dan advokasi hukum. Setiap tahunnya, IJRS menjaga komitmen untuk meningkatkan kinerjanya dalam (1) mendorong kebijakan terkait sistem peradilan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dan menciptakan sistem peradilan pidana yang bebas korupsi, adil dan efisien, (2) mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di institusi penegak hukum, (3) advokasi untuk tercapainya perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, IJRS juga berupaya untuk memastikan agar organisasi dapat dikelola secara profesional dan akuntabel.

Dengan mulai berakhirnya pandemi, IJRS melakukan penyesuaian mekanisme kerja yang mengkombinasikan kerja work from home dan work from office secara bergantian. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas kerja peneliti dan staff dalam melaksanakan program program lembaga.

Produktivitas dan kualitas kerja IJRS dapat terlihat dengan diselesaikannya penelitian-penelitian

mengenai reformasi kebijakan di pemerintah termasuk institusi penegak hukum. Beberapa hasil penelitian tersebut telah berhasil IJRS tuangkan dalam undang-undang, peraturan mahkamah agung, peraturan jaksa agung, serta beberapa pedoman di institusi Kejaksaan RI. IJRS juga menjadi salah satu tim perumus peta jalan isu keadilan restoratif di Indonesia. Berdasarkan peta jalan tersebut, IJRS juga memberikan bantuan teknis ke beberapa Kementrian atau Lembaga salah satunya Kantor Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI (Judicial Reform Team Office/JRTO) , Tim penghubung MA-KY, dan Pokja Akses Keadilan Kejaksaan RI.

Untuk kerja advokasi dan penelitian, IJRS melakukan pengawalan penyusunan KUHP dan judicial review UU Narkotika, serta beberapa penelitian mengenai penerapan dan peluang restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, disparitas putusan perkara narkotika, survey kebutuhan hukum untuk kelompok rentan, dan lainnya.

Secara keseluruhan, pada tahun 2022, IJRS mengelola 12 program berkolaborasi bersama 28 mitra baik dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah, maupun mitra pembangunan. Untuk itu, IJRS telah menerbitkan beberapa publikasi hasil penelitian dan advokasi dalam bentuk buku saku, booklet, pedoman dan berbagai tulisan opini di media. Publikasi IJRS juga ditampilkan dalam berbagai platform media sosial baik Instagram, twitter, youtube, tiktok baik dalam bentuk infografis, video, reels, dan lainnya. Saat ini media sosial IJRS khususnya Instagram telah diikuti oleh 3.835 followers, dan situs IJRS telah diakses sebanyak 91.225 kali. Tulisan-tulisan peneliti IJRS juga telah dipublikasikan di media masa seperti The Conversation. Selain itu peneliti IJRS kerap kali menjadi narasumber di berbagai diskusi publik, media online, podcast, radio, dan TV.

Selain kerja dengan mitra luar, tak lupa IJRS juga melakukan pembenahan kelembagaan dan menjaga tata kelola lembaga berjalan dengan baik. Kelengkapan

aturan internal juga terus dilakukan seperti misalnya dikeluarkannya SK Ketua Perkumpulan IJRS No. 18/SK/IJRS/SK-Perkumpulan/VII/2022 tentang Aturan Kode Etik dan Perilaku Personil Lembaga dan SK Ketua Perkumpulan IJRS No. 21/SK/IJRS/SK-Perkumpulan/XII/2022 tentang Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja.

Selain itu IJRS melakukan revisi atas SOP-SOP lainnya lainnya termasuk SOP Sistem Keuangan dan Administrasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola lembaga serta menjadi panduan bagi semua anggota lembaga dalam melakukan pekerjaan sehari hari.

Tentunya dalam mewujudkan capaian-capaian tersebut IJRS tidak berjalan sendirian. IJRS melakukan kolaborasi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang juga memiliki visi yang sama untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, kami berterimakasih kepada para mitra CSO, mitra pemerintah diantaranya Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM khususnya BPHN, Kemenkopolhukam, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Sekretrariat Open Government Indonesia (OGI), serta mitra pembangunan yang selama beberapa tahun terakhir telah mendukung kerja-kerja IJRS diantaranya adalah AIPJ2, TAF, TIFA, UN Women, Rutgers, OSF, NCHR, IOM, IDRC-ALG, IDLO, CRM-UNAIDS.

Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Pengawas serta Badan Eksekutif IJRS atas kerja kerasnya menjaga komitmen pada visi lembaga dalam melakukan kerja-kerja penelitian, advokasi, serta edukasi kepada publi,k sehingga hasil kerja IJRS dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan. Mari kita menyongsong 2023 dengan optimisme dan semangat yang kuat untuk terus konsisten dan berkomitmen pada visi misi lembaga dalam mendorong reformasi di bidang hukum dan peradilan.

Pengantar

Direktur Eksekutif

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai lembaga perkumpulan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memastikan prinsip akuntabilitas kepada publik tetap terlaksanakan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban yang disusun ini merupakan pelaksanaan dari mandat organisasi IJRS sejak dibentuk pertamakali pada tahun 2018 lalu, dimana lembaga kami mempunyai visi untuk mewujudkan peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kami dari IJRS memiliki 4 (empat) fokus utama, yaitu (i) menciptakan kebijakan terkait sistem peradilan pidana Indonesia yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan,

(ii) memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik pada institusi aparat penegak hukum, (iii) memastikan agar kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan, dan (iv) memastikan agar organisasi menjadi semakin professional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada periode kerja 2022 lalu, tentu saja isu hukum dan peradilan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian publik. Hal ini dapat terlihat bagaimana ramainya diskusi tentang penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kasus-kasus yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut.

Melihat masih banyaknya permasalahan hukum pada periode 2022 lalu, tentu saja peran riset dan advokasi yang berbasiskan bukti tetap menjadi relevan. Apalagi pada tahun 2023 yang akan datang, tantangan dalam penegakan hukum tetap menjadi isu krusial, dimana setiap instansi penegak hukum serta semua lapisan masyarakat perlu memperhatikan implementasi dari UU TPKS dan KUHP. Kedua peraturan tersebut akan sangat penting karena akan beririsan dari masalah-masalah yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat. Bahkan rencana revisi peraturan UU Narkotika menjadi salah satu isu yang nantinya akan dibahas. Hal ini menjadi penanda bahwa peran riset dalam pembaruan hukum harus semakin ditingkatkan. Oleh karenanya, kami dari IJRS berharap laporan

tahunan lembaga kami dapat menjadi suatu refleksi kerja lembaga selama ini, sehingga bisa menjadi masukan bagi kepada pihak eksternal maupun internal untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Akhir kata, atas nama Badan Eksekutif IJRS, Saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan-dukungan dari lembaga masyarakat sipil, universitas, mitra pembangunan, pemerintah, dan semua pihak yang membantu kerja-kerja IJRS selama ini. Semoga seluruh pihak IJRS akan semakin meningkatkan dan memperbaiki kinerja kami selama ini, dan hasil-hasil kerja kami dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan.
Terima kasih banyak sebelumnya

Daftar Isi

Pengantar Ketua Perkumpulan 3
Pengantar Direktur Eksekutif 6
Tentang IJRS 11
Team Behind IJRS 2022 15
IJRS 2022 dalam Angka 24
Pencapaian IJRS 2022 27
Life at IJRS 36
Pengelolaan Keuangan IJRS 2022 41
IJRS 2022 dalam Internet 43
IJRS dalam Media Online 54
Mitra IJRS 2022 57

zz

Tentang IJRS

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) didirikan pada pada tanggal 23 November 2018. IJRS merupakan badan hukum yang bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018

Visi

Peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Misi

1. Menyediakan penelitian hukum dan sosial berbasis bukti yang dapat dipercaya dan berkualitas;
2. Mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum strategis;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial.

Fokus

PENELITIAN HUKUM

Untuk kajian, monitoring dan evaluasi isu hukum serta sosial yang berbasiskan bukti dan terpercaya

ADVOKASI HUKUM

Untuk mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum yang strategis

EDUKASI HUKUM

Untuk peningkatan kapasitas demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial

Kontak

www.ijrs.or.id
office@ijrs.or.id
+62 821 2500 8141
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
@ijrs_official
@ijrs_official
lifeatIJRS
IJRS TV

Dewan Pengawas

Nisa Istiani, S.H., M.LI.

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Al Azhar Indonesia

Selengkapnya di **sini**

Hasril Hertanto, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Selengkapnya di **sini**

Wiwiek Awiati, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Selengkapnya di **sini**

Junaedi, S.H., M.Si., LL.M

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Selengkapnya di **sini**

Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Selengkapnya di **sini**

Team Behind IJRS 2022

IJRS merupakan lembaga yang terdiri dari anak-anak muda dan berpegang pada nilai-nilai keberagaman, toleransi dan kolaborasi untuk bersama-sama memberikan solusi atas permasalahan sosial dan hukum yang ada di Indonesia.

Selain berperan dalam memimpin dan memastikan arah kerja lembaga berjalan secara tepat sasaran, Dio juga terlibat aktif dalam riset maupun advokasi terkait isu disabilitas, akses terhadap keadilan, tata kelola lembaga, bantuan hukum, keterbukaan pemerintah dan narkotika. Selengkapnya lihat di **sini**

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Direktur Eksekutif

Berperan memastikan pengelolaan program agar memperoleh hasil dan dampak yang diharapkan. Adery juga terlibat aktif dalam riset dan advokasi di isu-isu reformasi hukum pidana, tata kelola lembaga, narkotika, hingga kekerasan seksual. Selengkapnya lihat di **sini**

Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.
Deputi Program

Berperan memastikan pengelolaan sumber daya manusia dan operasional lembaga berjalan dengan baik. Bestha juga terlibat aktif dalam riset dan advokasi di isu-isu disabilitas kekerasan seksual, hingga perkawinan anak. Selengkapnya lihat di **sini**

Bestha Inatsan Ashila, S.H.
Deputi Internal

Berperan dalam memastikan aktivitas operasional sekaligus keuangan lembaga dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Dian juga terlibat dalam pengelolaan keuangan program yang masuk ke lembaga. Selengkapnya lihat di **sini**

Dian Saraswati, S.Ak.
Manajer Operasional

Berperan memastikan pengelolaan produk pengetahuan lembaga baik secara internal maupun yang dipublikasikan ke eksternal. Arsa juga terlibat aktif dalam riset dan advokasi di isu-isu akses terhadap keadilan, bantuan hukum, perkawinan anak, hingga kekerasan seksual. Selengkapnya lihat di **sini**

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.
Manajer Pengelolaan Pengetahuan

Berperan memastikan pengelolaan administrasi lembaga berjalan dengan baik dalam internal lembaga maupun dengan pihak eksternal. Shofana juga terlibat aktif dalam mengelola sumber daya manusia di lembaga. Selengkapnya lihat di **sini**

Shofana Sekar Humairoh. S.M.
Staf Administrasi

Berperan dalam memastikan administrasi lembaga dapat dijalankan dengan baik. Igo juga terlibat dalam aktivitas administrasi yang berkaitan dengan pihak eksternal maupun internal. Selengkapnya lihat di **sini**

Stepanus Igo Kewa, A.Md. AB
Staf Administrasi

Berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan lembaga dapat dijalankan dengan baik. Ayu juga terlibat dalam pengelolaan keuangan program yang masuk ke lembaga termasuk aktivitas administrasi yang terkait. Selengkapnya lihat di **sini**

Ayu Budi Tiyaningsih, S.Tr.Ak
Staf Keuangan

Berperan dalam memastikan aktivitas keuangan program maupun sehari-hari lembaga dapat dijalankan dengan baik. Agung juga terlibat dalam memastikan pemenuhan kewajiban pajak lembaga dan pekerja. Selengkapnya lihat di **sini**

Agung Prasetyo, S.Tr.Ak.
Staf Keuangan

Berperan dalam memastikan pengelolaan branding lembaga agar dapat mencerminkan identitas lembaga secara strategis. Neka juga terlibat dalam pengelolaan konten dan media sosial dan aktivitas kampanye yang relevan. Selengkapnya lihat di **sini**

Neka Rusyda Supriatna, S.Hum.
Staf Media Komunikasi

Berperan dalam memastikan teknis pengelolaan produk pengetahuan lembaga secara internal. Lala juga terlibat aktif dalam pengelolaan konten dalam media sosial lembaga. Selengkapnya lihat di **sini**

Kholilah Dzati Izzah, S.KPm.
Staf Pengelolaan Pengetahuan

Berperan dalam aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu akses terhadap keadilan, bantuan hukum hingga kelompok rentan. Rizaldi juga merupakan Ketua MaPPI FH UI. Selengkapnya lihat di **sini**

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
Peneliti Pendukung

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu reformasi hukum pidana, narkotika, hingga keadilan restoratif. Marbun juga terlibat secara aktif dalam kerja-kerja Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI. Selengkapnya lihat di **sini**

Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu reformasi hukum pidana, narkotika, hingga keadilan restoratif. Matheus juga terlibat aktif dalam asistensi kerja-kerja Kejaksaan dan Mahkamah Agung RI. Selengkapnya lihat di **sini**

Matheus Nathanael Siagian, S.H.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual dan legal empowerement. Marsha juga telah terlibat aktif dalam penyusunan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selengkapnya lihat di **sini**

Marsha Maharani, S.H.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual. Naomi juga telah terlibat aktif dalam penyusunan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Naomi Rehulina Barus, S.H.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Soufi juga terlibat aktif dalam peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan. Selengkapnya lihat di **sini**

Kharisanty Soufi Aulia, S.H.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kelompok rentan, akses keadilan dan bantuan hukum. Gladys juga telah terlibat aktif dalam penguatan portal informasi dan branding lembaga. Selengkapnya lihat di **sini**

Gladys Nadya Arianto, S.Sos.
Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu reformasi hukum pidana. Selengkapnya lihat di sini

Aisyah Assyifa, S.H.
Asisten Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu reformasi hukum pidana dan legal empowerement. Selengkapnya lihat di **sini**

Siti Ismaya, S.H
Asisten Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu akses keadilan dan kekerasan seksual. Selengkapnya lihat di **sini**

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, S.Sos., M.Si.
Asisten Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual dan legal empowerement. Selengkapnya lihat di **sini**

Arianda Lastiur Paulina, S.H.
Asisten Peneliti

Berperan aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu reformasi hukum pidana. Selengkapnya lihat di **sini**

Aditya Weriansyah
Asisten Peneliti

Telah berperan dalam aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kelompok rentan dan perdagangan orang. Ad'har juga terlibat aktif dalam advokasi di isu narkotika.

M. Ad'har Nasir, S.H
Asisten Peneliti (sampai November 2022)

Telah berperan dalam aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu akses keadilan, bantuan hukum dan narkotika. Nanda juga telah terlibat aktif dalam penguatan portal informasi dan branding lembaga.

Nanda Oktaviani, S.Sos
Peneliti (sampai April 2022)

Telah berperan dalam aktivitas riset dan advokasi yang berkaitan dengan isu kelompok rentan. Maria juga telah terlibat aktif dalam advokasi di isu ganja medis.

Maria Isabel Tarigan, S.H
Peneliti (sampai Maret 2022)

Komposisi Badan Eksekutif

Jenis Kelamin

8 Laki-laki

17 Perempuan

Pendidikan Terakhir

19 Strata 1

5 Strata 2

1 Diploma

Usia

7 21 - 24 tahun

12 25 - 28 tahun

6 29 - 32 tahun

Komposisi tim

13 Peneliti

6 Asisten peneliti

6 Staff pendukung

Komposisi Badan Pengurus Harian

Jenis Kelamin

3 Laki-laki

5 Perempuan

*data per Desember 2022

7
3
9
40
8
20

IJRS 2022 dalam Angka

MENGELOLA **12** **PROGRAM**

MENGHASILKAN

6 **BUKU**

Baik penelitian, booklet, laporan penelitian, hingga ringkasan eksekutif

TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN DAN ADVOKASI REFORMASI TERHADAP **5** **KEBIJAKAN**

BERKOLABORASI BERSAMA

28 MITRA

- **11** Kementerian/ Lembaga
- **11** Masyarakat Sipil
- **6** Mitra Pembangunan

Yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah maupun mitra pembangunan di isu reformasi hukum pidana, akses keadilan dan kelompok rentan.

TERDIRI DARI

19

PENELITI & ASISTEN PENELITI DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KEMAMPUAN

Di isu hukum pidana dan acara pidana, sosio-legal, akses keadilan, reformasi kebijakan, perlindungan kelompok rentan, bantuan hukum, penelitian dan pengolahan data kuantitatif

DIIKUTI OLEH

5.000+

PENGIKUT

Di media sosial IJRS baik Instagram, Twitter, Tiktok, dan Youtube.

WEBSITE IJRS DIAKSES

115.000+ KALI

DIKUTIP OLEH

50+ MEDIA

Baik soal hasil penelitian, booklet, laporan penelitian, hingga ringkasan eksekutif

MELAKUKAN REKRUTMEN TERHADAP

5 ASISTEN PENELITI

2 STAFF

MELAKUKAN PENYUSUNAN

2 SOP LEMBAGA

Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual dan Kode Etik Personel

MEDIA SOSIAL IJRS DIJANGKAU

20.000+ ORANG

YOUTUBE IJRS DITONTON

6.800+ KALI

PERSONIL IJRS TERLIBAT DALAM

26 PELATIHAN

Untuk peningkatan kapasitas peneliti maupun staff.

MEMBAGIKAN PENGETAHUAN PADA

50+ DISKUSI PUBLIK

Baik sebagai pembicara, moderator maupun fasilitator.

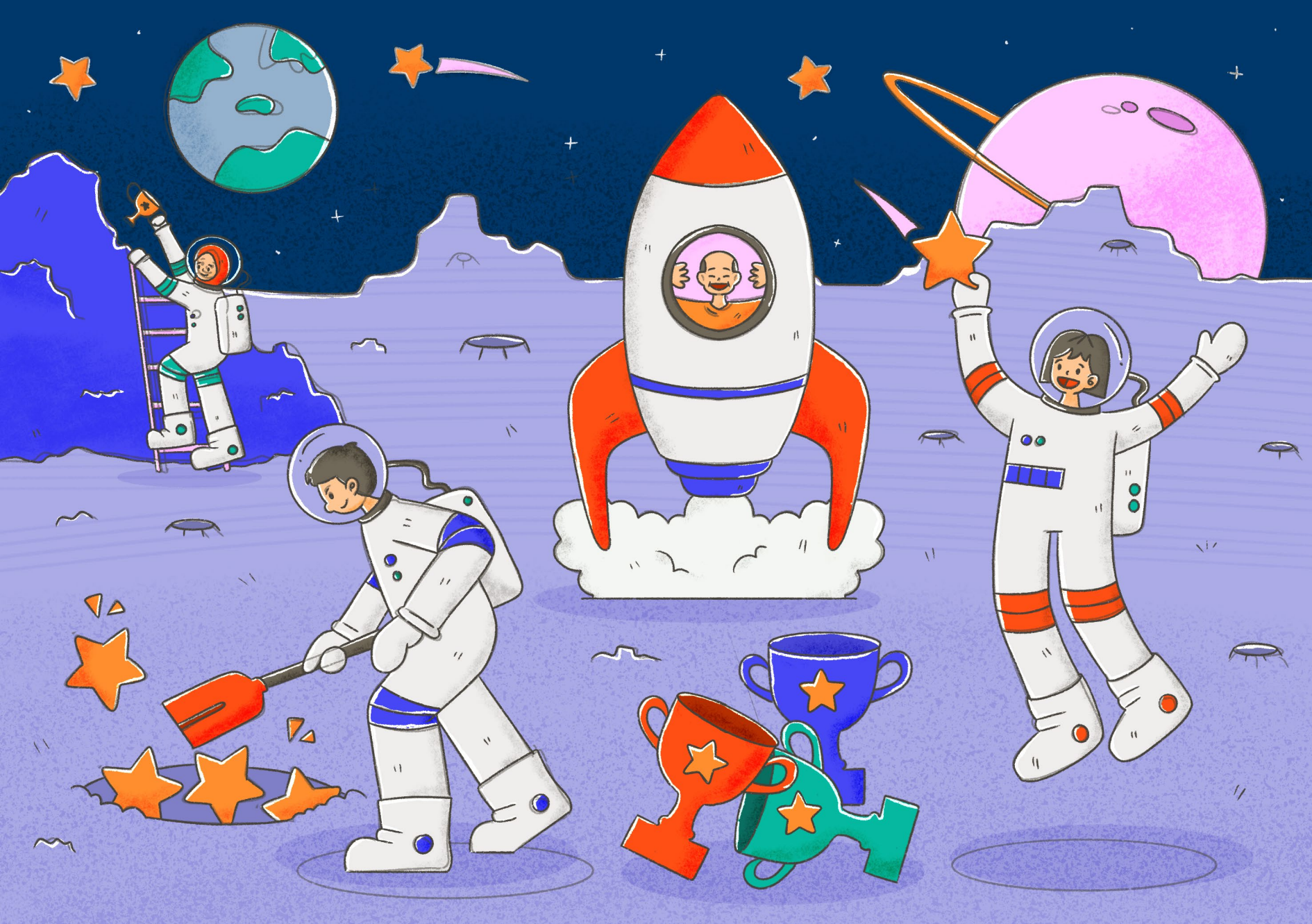

Pencapaian IJRS 2022

01

IJRS berkomitmen untuk menciptakan kebijakan terkait sistem peradilan pidana Indonesia yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana menciptakan sistem peradilan pidana yang bebas korupsi, adil dan efisien. Komitmen ini dicapai di Tahun 2022 melalui:

IJRS aktif terlibat dalam penyusunan Undang-undang dan peraturan internal aparat penegak hukum

Terlibat dalam pengawalan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

IJRS memberikan masukan kepada rancangan KUHP yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR RI. Masukan ini diberikan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh IJRS. Tujuannya, agar rancangan KUHP yang disusun sesuai dengan rasionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan

HASIL

Catatan dan masukan terhadap DIM RKUHP

PIHAK YANG TERLIBAT

DPR RI, Kemenkumham RI, Aliansi RKUHP

JAN - NOV 2022

Penyusunan Pedoman Narkotika di Kejaksaan RI

Selengkapnya disini:

IJRS melakukan asistensi terhadap penyusunan pedoman penuntutan narkotika di Kejaksaan RI. Dengan adanya pedoman penuntutan narkotika ini, diharapkan Kejaksaan mempunyai variabel yang lebih rasional dalam menentukan tuntutan pada perkara narkotika

HASIL

Pedoman Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

PIHAK YANG TERLIBAT

Kejaksaan RI, The Asia Foundation, AIPJ 2

NOV 2021 – MAR 2022

Judicial Review UU Narkotika

Judicial review (JR) ini diharapkan dapat mengubah pengaturan narkotika golongan I bisa digunakan dalam rangka keperluan medis. Meskipun JR ini tidak dikabulkan oleh MK, tetapi dalam pertimbangan putusan, MK meminta pihak pemerintah melakukan kajian terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk keperluan medis

HASIL

Putusan Mahkamah Konstitusi JR Narkotika

PIHAK YANG TERLIBAT

ICJR, LGN, Rumah Cemara, LBHM, EJA Surabaya, Yakeba

APR 2020 – JUL 2022

IJRS turut aktif berkontribusi untuk menghasilkan riset yang kuat dalam mendukung perubahan kebijakan peradilan pidana di Indonesia

Riset yang kuat untuk mendukung perubahan kebijakan peradilan pidana di Indonesia

Selengkapnya disini:

IJRS terlibat dalam riset untuk menyusun konsep dan de nisi restorative justice serta memetakan peluang penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adanya riset terkait defini i restorative justice serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan terkait implementasi restorative justice di Indonesia

HASIL

- Buku Penerapan dan peluang restorative justice di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
- Peta jalan penerapan restorative justice di Indonesia

PIHAK YANG TERLIBAT

Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kementerian PPN/ Bappenas, AIPJ 2, ICJR, LeIP

JAN - DES 2022

Riset Disparitas putusan Narkotika di Indonesia

Selengkapnya disini:

IJRS menyusun dan melakukan riset terkait disparitas penanganan narkotika di Indonesia. Adanya riset ini dapat menjadi masukan penyusunan kebijakan terkait penanganan perkara narkotika di Indonesia

HASIL

Buku dan infografis iset disparitas penanganan perkara narkotika di Indonesia

APR 2021 - JUL 2022

PIHAK YANG TERLIBAT

Open Society Foundation

Survei kebutuhan hukum untuk kelompok rentan di Indonesia

Selengkapnya disini:

IJRS menyusun dan melakukan penelitian untuk mendapatkan data kebutuhan hukum kelompok rentan di Indonesia. Data-data penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum, termasuk kebijakan bantuan hukum di Indonesia

HASIL

Buku dan infografis su vei kebutuhan hukum kelompok rentan di Indonesia

JUNI – DES 2022

PIHAK YANG TERLIBAT

BPHN, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI, NCHR (Norwegian Center for Human Rights)

Penelitian Faktor-Faktor Penjatuhan Haukuman Mati di Indonesia

Selengkapnya disini:

IJRS berkolaborasi melakukan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai faktor-faktor penjatuhan hukuman mati melalui analisis putusan pengadilan. Hasil data ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk praktik-praktik penjatuhan hukuman mati di Indonesia.

HASIL

Laporan penelitian faktor-faktor penjatuhan hukuman mati di Indonesia

FEB – NOV 2022

PIHAK YANG TERLIBAT

LBH Masyarakat dan Reprieve

02

IJRS berkomitmen untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik pada institusi aparat penegak hukum. Komitmen ini dicapai di Tahun 2022 melalui:

IJRS aktif terlibat dalam memberikan asistensi teknis di lembaga pemerintahan

Menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan di Kejaksaan RI

Bergabungnya IJRS menjadi anggota Pokja ini bertujuan untuk menyusun, reformasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait akses keadilan di Kejaksaan RI.

HASIL

- Pedoman Narkotika di Kejaksaan
- Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia
- Bimbingan Teknis terhadap penuntut umum terkait penanganan perkara narkotika, keadilan restoratif, serta perempuan dan anak

JUL 2021 - SEKARANG

PIHAK YANG TERLIBAT
Kejaksaan dan AIPJ2

Peneliti IJRS menjadi salah satu anggota tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Adanya keterlibatan ini bertujuan memberikan asistensi komunikasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar relasi dan komunikasi antara KY dan MA dapat berjalan secara efektif.

HASIL
Rancangan kebijakan dan aktivitas

MAR 2021 - SEKARANG

PIHAK YANG TERLIBAT
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Konsultan dalam perjanjian pengelolaan RSU Adhyaksa antara Kejaksaan RI dengan Pemprov DKI Jakarta

Keterlibatan IJRS dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi pengakhiran dan amandemen perjanjian kerjasama pengelolaan RSU Adhyaksa antara Kejaksaan dan Pemprov DKI Jakarta sebagai amanat dari UU Kejaksaan.

HASIL

Rancangan Amandemen Perjanjian

PIHAK YANG TERLIBAT

Kejaksaan, Pemprov DKI dan RSU Adhyaksa

JUL 2021 - SEKARANG

Melakukan pengawalan implementasi Renaksi OGI 2020-2022

Aktivitas ini bertujuan melakukan pengawalan dan mengimplementasi renaksi OGI 2020-2022 pada sektor keadilan agar tercapainya renaksi OGI 2020-2022 di K/L terkait

HASIL

Rencana Aksi dan Laporan Monev di Sektor Keadilan

PIHAK YANG TERLIBAT

Seknas OGI, Bappenas, Kejaksaan, Asosiasi APIK, PBHI

JUL 2020 - SEKARANG

IJRS berkomitmen untuk memastikan agar kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Komitmen ini dicapai di Tahun 2022 melalui:

IJRS aktif berkontribusi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan kelompok rentan

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

IJRS melakukan asistensi terhadap Kejaksaan RI dalam menyusun RUU TPKS berbasiskan riset yang dilakukan bersama konsorsium masyarakat sipil. Hal ini bertujuan agar diperoleh pengaturan terkait kekerasan seksual yang ideal.

HASIL

Draft Final dari RUU TPKS

PIHAK YANG TERLIBAT

Kejaksaan dalam Gugus Tugas Percepatan UU TPKS

APR 2021 - APR 2022

IJRS turut menghasilkan riset sebagai bukti atas kebutuhan kelompok rentan yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan dan perbaikan kebijakan terkait kelompok rentan

Penelitian terkait Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia

Selengkapnya disini:

IJRS bersama konsorsium masyarakat sipil melakukan penelitian terhadap pengaturan kekerasan seksual di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS.

HASIL
Laporan penelitian pengaturan kekerasan seksual di Indonesia

PIHAK YANG TERLIBAT
ICJR, Puskapa UI dan Rutgers

SEPT 2021 – MAR 2022

Penyusunan DIM RUU TPKS sebagai bahan advokasi pembahasan RUU TPKS

IJRS bersama konsorsium masyarakat sipil melakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari RUU TPKS sebagai bahan masukan bagi Pemerintah maupun DPR dalam pembahasan RUU TPKS.

HASIL
DIM Masukan terkait UU TPKS

PIHAK YANG TERLIBAT
ICJR dan Puskapa UI

JAN – MAR 2022

Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan

Selengkapnya disini:

IJRS melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan di perkara kekerasan seksual untuk melihat sejauh mana perkara kekerasan seksual ditangani di pengadilan. Riset ini turut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang memproses hukum dan turut menjadi masukan bagi penyusunan RUU TPKS .

HASIL

Laporan penelitian refle si penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia

PIHAK YANG TERLIBAT

AIPJ2

JAN – NOV 2022

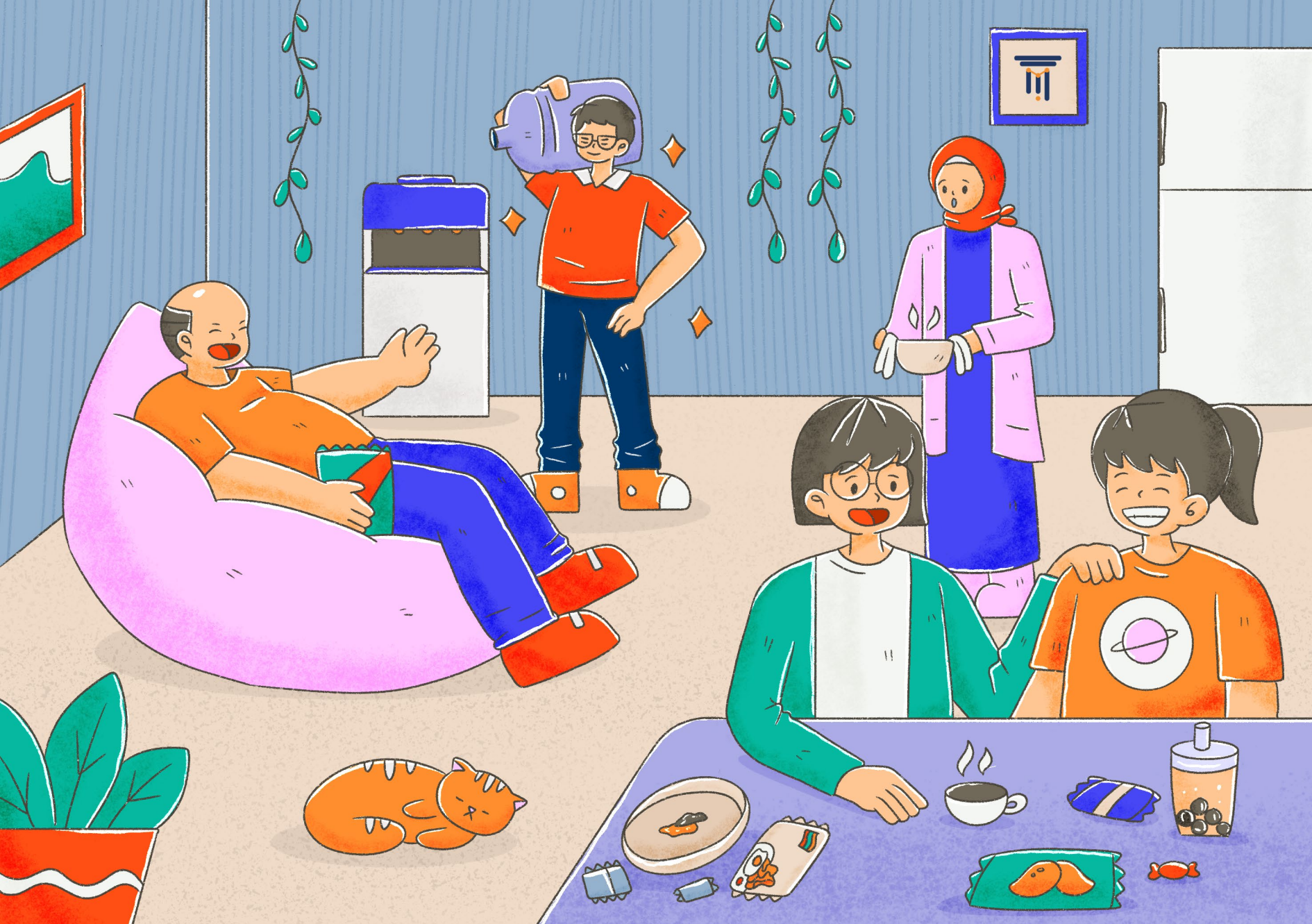

Life at IJRS

IJRS berkomitmen memastikan agar organisasi menjadi semakin professional dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini dicapai di Tahun 2022 melalui:

PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN LEMBAGA

Penyusunan SOP Internal Lembaga

IJRS telah menerbitkan beberapa peraturan internal lembaga:

1. SK Ketua Perkumpulan IJRS No. 18/SK/IJRS/SK-Perkumpulan/VII/2022 tentang Aturan Kode Etik dan Perilaku Personil Lembaga
2. SK Ketua Perkumpulan IJRS No. 21/SK/IJRS/SK-Perkumpulan/XII/2022 tentang Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja.

Penyusunan Laporan Keuangan yang Diaudit Oleh Auditor Eksternal

IJRS telah melakukan audit keuangan internal tahunan oleh auditor eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akuntabel.

Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Badan Pekerja

26 Pelatihan telah diikuti oleh peneliti maupun staff IJRS untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan kerjanya sehari-hari. Daftar pelatihan terlampir

Sharing Produk Pengetahuan Kepada Publik

Distribusi produk pengetahuan dilakukan oleh IJRS kepada pihak eksternal baik publik, maupun mitra dalam berbagai bentuk mulai dari diskusi publik, publikasi media sosial hingga sharing informasi di platform lainnya.

54 diskusi publik dan 3 konferensi internasional telah diikuti oleh personil IJRS baik sebagai narasumber, moderator maupun fasilitator. Daftar diskusi publik dan konferensi terlampir.

Tidak hanya itu, media sosial IJRS juga secara rutin membagikan berbagai informasi terkait isu akses keadilan, kelompok rentan maupun hukum pidana dalam berbagai tema. Selengkapnya tentang laporan media IJRS dapat dilihat di bagian IJRS dalam Internet

Personil IJRS juga turut membagikan pengetahuan dalam tulisan melalui media massa terkait berbagai isu seperti kekerasan seksual, RKUHP dan akses keadilan.

PENGEMBANGAN SISTEM *KNOWLEDGE MANAGEMENT* AGAR INFORMASI DAN PENGETAHUAN DI LEMBAGA DAPAT DIKELOLA DENGAN BAIK

Sharing Session Internal

Distribusi produk pengetahuan tidak hanya dilakukan kepada pihak eksternal namun juga secara internal. IJRS mengemas sesi sharing dalam tajuk OBSERVASI (Obrolan Seru untuk Evaluasi) di antaranya adalah:

1. OBSERVASI #1: Kupas Tuntas Advokasi UU TPKS dan Program Disparitas Narkotika

PENINGKATAN KEERATAN ANTAR PERSONIL DAN PRODUKTIVITAS PEKERJA

Team Building Trip

Tidak hanya memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan lembaga secara baik, IJRS turut mendorong adanya peningkatan produktivitas pekerja melalui serangkaian aktivitas di luar pekerjaan sehari-hari melalui team building trip. Kegiatan ini dilakukan agar terbentuk team-bonding antara anggota badan pekerja serta agar lebih mengenal antar satu sama lain. Kegiatan ini juga bertujuan supaya anggota badan pekerja dapat refreshing sejenak agar lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja.

IJRS
Indonesia Judicial Research Society

Pengelolaan Keuangan IJRS 2022

Total dana yang dikelola pada tahun 2022:

Rp 14.982.816.601

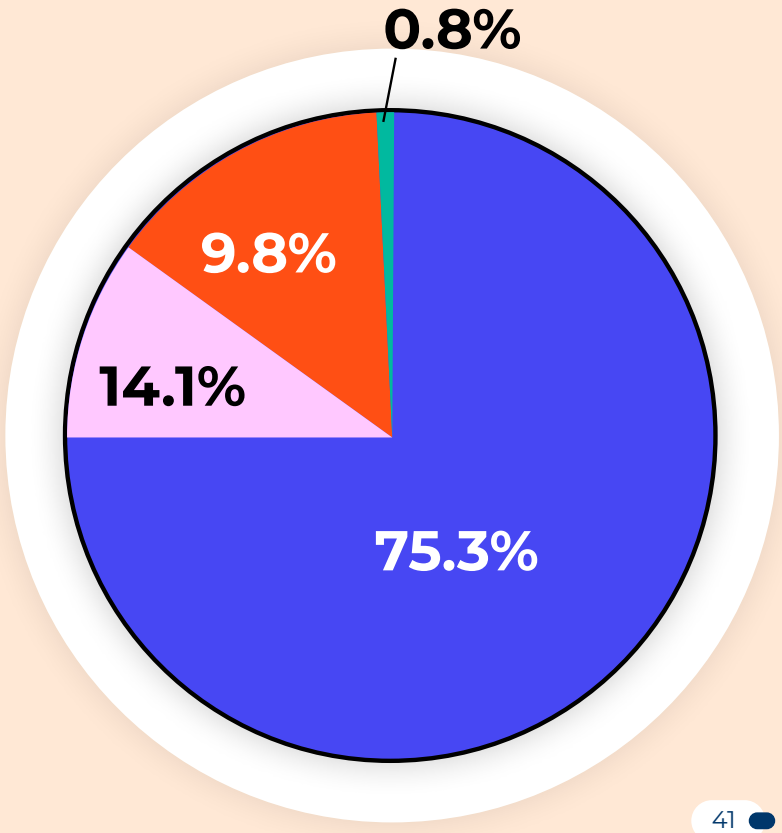

Hasil Audit Keuangan Lembaga 2021:

WAJAR

oleh KAP Tri Bowo Yulianti

IJRS 2022 dalam Internet

MEDIA SOSIAL IJRS

#2022REWIND

Akhir tahun 2019, IJRS mulai membuat akun-akun media sosial seperti:

FOLLOW

Di media sosial khususnya Instagram selain konten edukasi dalam bentuk infografis, IJRS punya bermacam-macam kategori konten seperti **#ApaKataHukum** **#LihatData** **#TrendingToday** **#BerbagiKisah** **#BerbagiOpini** dan yang baru saja diluncurkan di tahun 2022 ini ada **#JurnalRiset**

Selama tahun 2022 ini, engagement terbesar kami di Instagram adalah saat:

1. Kolaborasi bersama Koalisi Peduli Penjara, total engagement selama satu bulan kampanye **mencapai 622K** dan menjadi **NGO dengan engagement tertinggi diantara anggota lainnya selama masa kampanye**

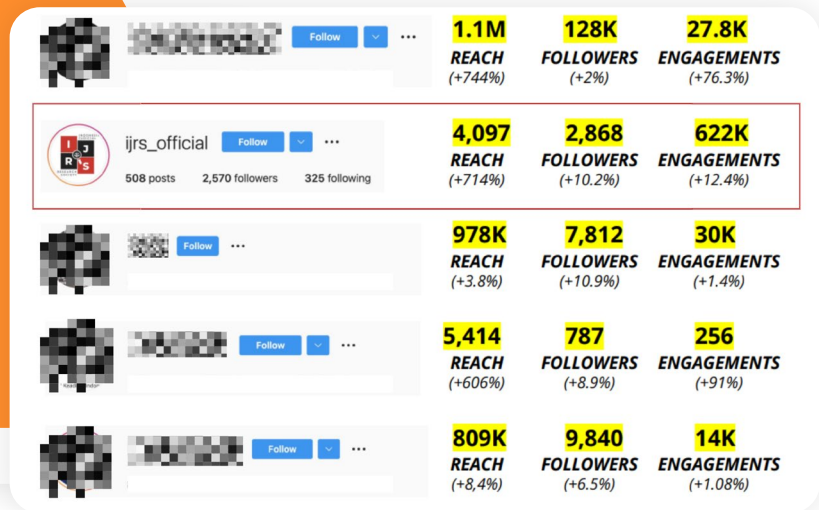

2. Perayaan **"World Mental Health Day"** dengan total reach organik tanpa iklan sebesar **15.193**

PROFIL MEDIA SOSIAL IJRS[1]

A.INSTAGRAM

ENGAGEMENT RATE

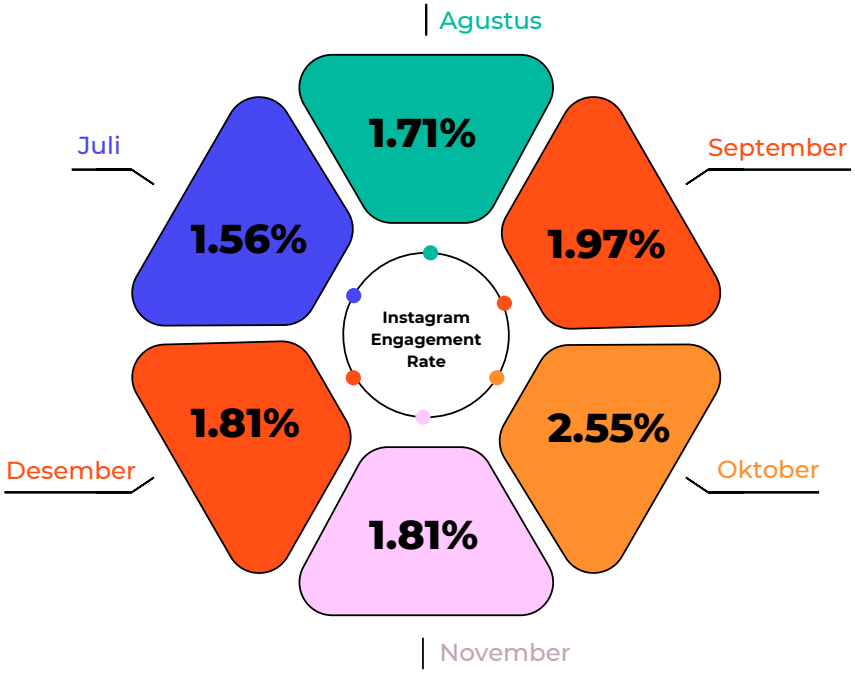

Berdasarkan analitik dari *website planx.com* selama 6 bulan terakhir, *engagement rate Instagram* IJRS tertinggi berada pada bulan Oktober 2022. ***Engagement rate* IJRS mencapai angka 2.55%**

- Salah satu yang membuat *engagement rate* bulan Oktober ini besar adalah konten ***"World Mental Health Day"*** dengan total *reach* organik tanpa iklan sebesar 15.193, selain itu konten terbaru IJRS yaitu Jurnal Riset juga cukup banyak di-*save* oleh followers kami kurang lebih mencapai 40 *save*.

PROFIL PENGIKUT

Keberhasilan dan capaian engagement di Instagram tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dari para *followers* kami. Untuk lebih mengenal siapa saja *followers* kami, berikut data demografinya[2]:

- Total followers **3.835 (+1.233 pengikut dari 2021)**
- Usia followers terbanyak : **25-34 tahun (44,1%)**
- Jumlah followers Laki-laki sebanyak **62,4%**
- Jumlah followers Perempuan sebanyak **37,5%**
- Lokasi followers terbanyak dari Jakarta **(29,3%)**

1 Mengutip dari situs *hopperhq.com engagement rate* adalah suatu metrik standar yang dimanfaatkan dalam pemasaran media sosial dalam mengukur performa pada suatu konten dalam menjangkau *followers* di platform media sosial

2 data per 15 Desember 2022

ULASAN KONTEN

#ApaKataHukum

Kategori *#ApaKataHukum* bertujuan untuk **menjelaskan suatu istilah awam tentang isu hukum**. Selama 2022, **rata-rata engagement rate #ApaKataHukum mencapai 0,13%**

#LihatData

Kategori *#LihatData* berisi **data-data penelitian IJRS**. Dikemas kembali menjadi tampilan visual yang menarik tidak hanya sekedar angka atau grafik. Selama 2022, **rata-rata *engagement rate* #LihatData mencapai 0,16%**

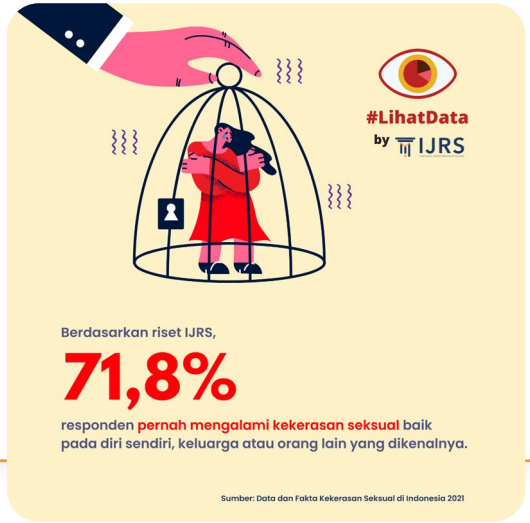

#TrendingToday

Kategori *#TrendingToday* **membahas isu yang sedang hangat atau viral** di dunia maya. Kami kaitkan isu tersebut dengan fakta dan data hasil riset IJRS. Selama 2022, **rata-rata *engagement rate* #TrendingToday mencapai 0,027%**

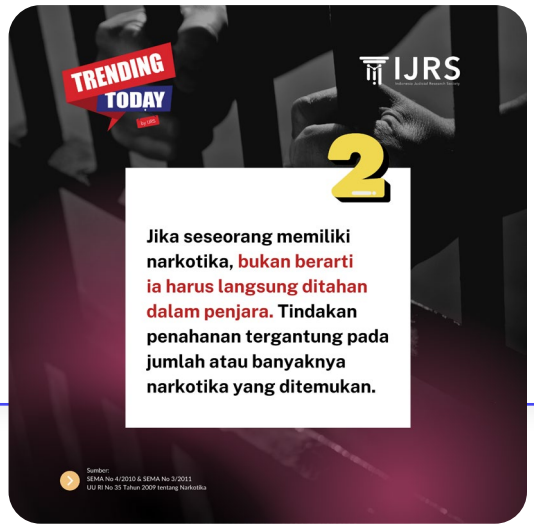

#BerbagiOpini

Kategori *#BerbagiOpini* berisi **opini atau tanggapan** dari seorang narasumber terkait suatu isu hukum tertentu. Selama 2022, **rata-rata *engagement rate* #BerbagiOpini mencapai 0,020%**

#BerbagiKisah

Kategori *#BerbagiKisah* berisi **cerita atau pandangan** dari seorang narasumber terkait suatu isu hukum tertentu. Selama 2022, **rata-rata *engagement rate* #BerbagiKisah mencapai 0,067%**

#JurnalRiset

Kategori *#JurnalRiset* bertujuan untuk memberikan **penjelasan tentang serba-serbi riset atau penelitian** di bidang ilmu sosial. Selama 2022, **rata-rata *engagement rate* #JurnalRiset mencapai 0,16%**

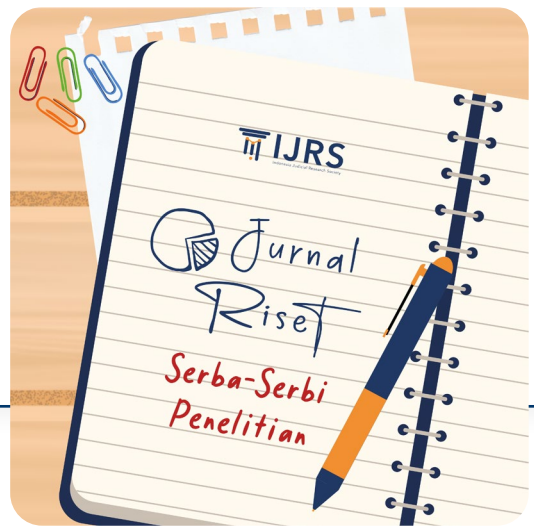

B.TWITTER

ENGAGEMENT RATE

Berdasarkan *twitter analytics* tingkat engagement rate Twitter IJRS selama 2022 adalah sebagai berikut:

Januari: 1.7%	**April: 2.5%**	Juli: 2.1%	Oktober: 2.2%
Februari: 2.1%	Mei: 2.7%	Agustus: 2.3%	**November: 2.5%**
Maret: 1.9%	**Juni: 2.5%**	September: 2.2%	**Desember: 2.5%**

PROFIL PENGIKUT

Twitter IJRS memiliki total 2.046 pengikut.

ULASAN KONTEN

Berikut adalah *tweet* yang paling populer dan mendapat engagement tertinggi di setiap bulan dalam Twitter IJRS:

April 2022

Rilis IJRS, ICJR, dan Puskapa tentang disahkannya UU TPKS

engagement post 34.7%

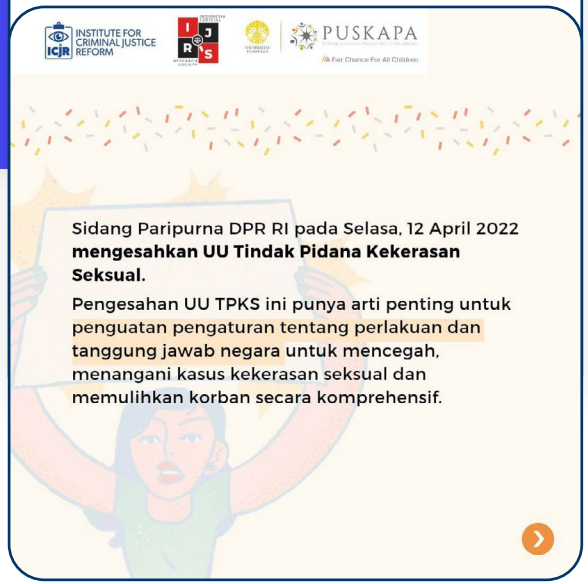

Juni 2022

Acara "Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022"

engagement post 27.4%

Nov 2022

Infografis Restorative Justice

engagement post 22.9%

Des 2022

Rilis Pers Talkshow IJRS "Mengurai Benang Kusut Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual"

engagement post 15.5%

C. YOUTUBE

Channel Youtube IJRS **(IJRS TV)** memiliki 292 subscribers[3]
Selama 2022 ini, kami sudah memproduksi 18 video *Youtube* yang terdiri dari video *live* webinar dan video produksi IJRS. Berikut ini data analytic Youtube IJRS sepanjang tahun 2022:

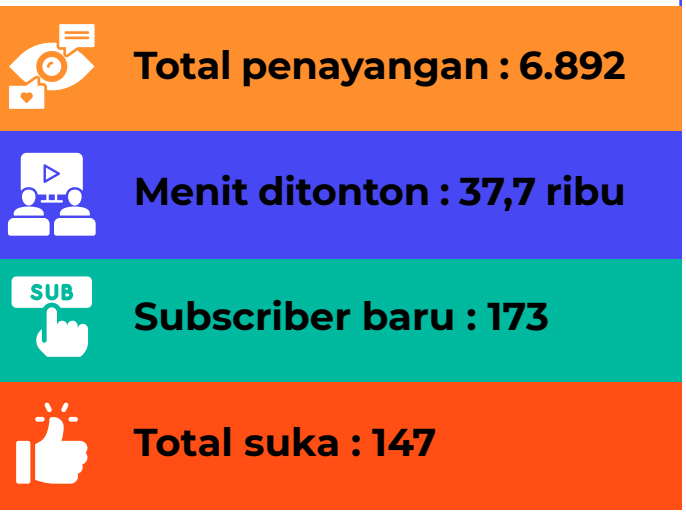

D. PODCAST

Podcast IJRS *(IJRS on Spotify)* dapat diakses melalui: **IJRS on Spotify**

Podcast IJRS terdiri dari *playlist podcast*:

- Dimana peneliti IJRS menjadi salah satu narasumbernya
- *Podcast* produksi IJRS bersama koalisi

Selama 2022 ini, IJRS on Spotify memproduksi **3 buah podcast**

3 data per 15 Desember 2022

E. WEBSITE

Total pengunjung **website IJRS** selama Januari – Desember 2022 adalah

Total kunjungan: 91.225
Total halaman diakses: 115.478

Perangkat yang digunakan untuk mengakses *website* IJRS:

71.1% menggunakan handphone

28.4% menggunakan desktop

0.5% menggunakan tablet

Konten website IJRS dengan kunjungan terbanyak adalah artikel tentang:

- **"Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia"** yang mencapai sekitar **22.016 viewers**
- **"Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius"** yang mencapai sekitar **17.537 viewers**

IJRS dalam Media Online

KUTIPAN IJRS DALAM MEDIA ONLINE[1]

IJRS sering sekali diminta keterangan sebagai narasumber atau dikutip oleh media untuk liputan media online. Beberapa tema atau isu IJRS yang pernah dikutip oleh media jumlahnya adalah sebagai berikut:

1 data per 15 Desember 2022

HASIL RISET IJRS MENJADI BAHAN INFOGRAFIS MEDIA ONLINE

Hasil riset IJRS ternyata tidak hanya menjadi bahan konten bagi internal IJRS saja, melainkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan referensi infografis oleh media online, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Sumber: Okezone News

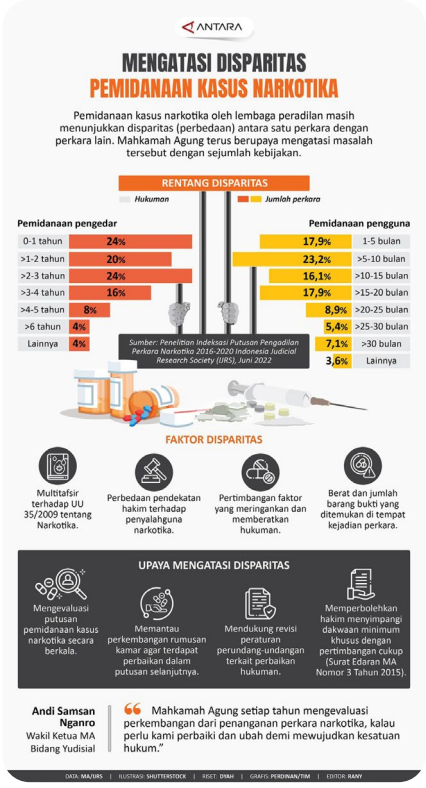

Sumber: Antara News

Access to justice
Discover justice
Justice For all

Mitra IJRS 2022

Lampiran

A. Pelatihan yang Diikuti oleh Anggota Badan Pekerja

1. Effective Leadership – PPM Manajemen (Muhammad Rizaldi W)
2. Managing People For Productivity – PPM Manajemen (Andreas Nathaniel Marbun)
3. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional, diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu 18-25 Juli 2022 (Adery dan Dio Ashar)
4. Pelatihan Statistik Dan Metodologi Penelitian Kuantitatif –INDEF (Bestha Inatsan Ashila, Kharisanty Soufie, Marsha Maharani)
5. Memahami Dan Menerapkan ISO 37002 : Whistleblowing Management System (Dian Saraswati)
6. Lokakarya Diskusi Penyusunan Strategi Advokasi Upaya Konversi - Crisis Response Mechanism (Kharisanty Soufie)
7. Lokakarya Finalisasi Advokasi Upaya Konversi - Crisis Response Mechanism (Kharisanty Soufie)
8. Pelatihan Akuntansi (Psak 71, 72, 73) – Ayu Budi T
9. Pelatihan Pajak (Pph 21, Pph 23, Pph 4 Ayat 2, Ppn) – Ayu Budi T dan Agung Prasetyo
10. Sohib Berkelas Series 2 : Content Creation Belajar Editing Video Content Bermodalkan Smartphone (Neka Rusyda Supriatna)
11. Sohib Berkelas Series 2 : Content Creation Seni Membuat Artikel Storytelling, “Berdongeng” Professional Masa Kini (Neka Rusyda Supriatna)
12. Canva Live Workshop: Learn How To Easily And Export Video With Canva (Neka Rusyda Supriatna)
13. Canva Live Workshop : How Nonprofits Can Make Change With Storytelling Techniques (Neka Rusyda Supriatna)
14. Workshop Berdaya Lewat Konten – Dewg Indonesia 2022 Kominfo (Neka Rusyda Supriatna)
15. Seminar “Peran Komunikasi Esg Dalam Mengamankan Pendanaan” – Maverick (Neka Rusyda Supriatna)
16. Ruang Maya Kreatif : Membongkar Proses Pembuatan Content Video Dari Hulu Ke Hilir Dan Bagaimana Cara Generasi Milenials Menentukan Ide Sebelum Produksi Berlangsung – Agustus 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
17. Dispusip Jakarta : Pembinaan Perpustakaan Khusus Dan Perpustakaan Kedinasan : Capturing Tacit Knowledge Di Perpustakaan Khusus – Agustus 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
18. Sosialiasi Peraturan Perpustakaan Nasional Ri Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (Neka Rusyda Supriatna)
19. The Conversation X Kok Bisa? Workshop Untuk Penelitian Indonesia : Membumikan Sains Melalui Media Sosial , Februari 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
20. Canva Live With Design School :Create Branded Vidoes For Your Workplace, Feb 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
21. Green Jobs Class : Visualisasi Data Dengan Infografik, Maret 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
22. Kominfo-Siberkreasi, Gojek Dan Hipwee Untuk Kegiatan Content Writing 101 – Maret 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
23. Sohib Berkelas Series 1 : Digital Marketing Membuat Perencanaan Konten Dan Digital Campaign Di Media Sosial , Maret 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
24. Sohib Berkelas Series 1 : Digital Marketing Content Writing 101: Melakukan Riset Dan Membuat Konten Berdasarkan Tren, April 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
25. Sohib Berkelas Series 1 : Digial Marketing Tiktok Marketing : Membuat Konten Tiktok Untuk Pemasaran, Juni 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
26. Sohib Berkelas Series 2 : Content Creation Membuat Design Konten Dengan Canva , Juli 2022 (Neka Rusyda Supriatna)

B. Konferensi yang Diikuti Anggota Pekerja

1. World Congress against the Death Penalty - International Drug Policy Consortium (IDPC) and ECPM in Berlin on 16-18 November 2022 (Adery Ardhan Saputro)
2. The Lisbon Addiction Conference - Lisbon Addiction 2022 in Lisbon on 23-25 November 2022 (Adery Ardhan Saputro)
3. Konferensi Nasional Keadilan Restoratif “ Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif” - Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keadilan Restoratif (IJRS, ICJR, LeIP) dengan Kemenkopolhukam, Kementerian Hukum dan HAM, BAPPENAS dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) dan The Asia Foundation (TAF) , Jakarta 1-2 Nov 2022 (Andreas Nathaniel Marbun, Matheus Nathanael Siagian, Adery Ardhan Saputro, Dio Ashar Wicaksana)
4. The 2nd International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health - ICFPRH Scientific 2022 - Center for Reproductive Health Faculty of Medicine, Public Health and Nursing UGM, Yogyakarta 23-25 Agustus 2022 (Arsa Ilmi Budiarti)

C. Anggota IJRS menjadi Narasumber atau Pemateri dalam Diskusi Publik

1. Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) 2022 – Panel 3 Peope- Centered Justice: Turning Ambitions into actions in Indonesia – Sept 2022 (Arsa Ilmi Budiarti)
2. Quo Vadis Pemberantasan Terorisme di Indonesia menurut KUHP Baru : Suatu Catatan Akhir Tahun – 12 Des 2022 (Adery Ardhan Saputro)
3. Bimbingan Teknis Penuntutan Umum sebagai Mediator Penal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum – Pekanbaru 21- 22 Des 2022 (Andreas Nathaniel Marbun dan Matheus Nathanael Siagian)
4. Bimbingan Teknis Penuntutan Umum sebagai Mediator Penal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum – Yogyakarta 12 – 15 Des 2022 (Adery Ardhan Saputro dan Matheus Nathanael Siagian)

5. Bimbingan Teknis Penuntutan Umum sebagai Mediator Penal dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum – Bali 21- 24 Nov 2022 (Andreas Nathaniel Marbun dan Matheus Nathanael Siagian s)
6. Seminar Peluncuran Penelitian Diferensiasi Fungsional Harapan VS Realita – 21 Des 2022 (Adery Ardhan Saputro)
7. Peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Nov 2022 – Adery Ardhan Saputro, Matheus Nathanael Siagian, Andreas Nathaniel Marbun)
8. Diskusi Publik BEM FH UI x ICEL: Membedah Tindak Pidana Lingkungan dan Korporasi dalam RKUHP(Adery Ardhan Saputro)
9. Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum- Agustus 2022 (Matheus Nathanael Siagian)
10. Seminar Nasional: Kontekstualisasi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia- Juli 2022 (Adery Ardhan Saputro dan Andreas Nathaniel Marbun)
11. Seminar Persada UB dan Dekrim UNDIP: Keadilan Restoratif dalam perkara Korupsi (Adery Ardhan Saputro)
12. Seminar RJ Komnas Perempuan (Adery Ardhan Saputro)
13. Webinar : Memperkuat Sinergi Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Strategi Efektif Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 - 28 Desember 2022 (Arsa Ilm Budiarti)
14. Asia Pacific Justice Forum: Building Partnership for the Rule of Law – December 2022 (Dio Ashar Wicaksana)
15. Pelatihan Jabatan Fungsional Komisi Yudisial - September 2022 (Dio Ashar Wicaksana)
16. Policy Dialogue Membahas Dua Hasil Riset untuk Masa Depan UU TPKS - INFID - Oktober 2022 (Dio Ashar Wicaksana)
17. Forum Diskusi Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi – November 2022 (Dio Ashar Wicaksana)
18. Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 – Nov 2022 (Dio Ashar Wicaksana)
19. Grand Training Hopehelps - Sept 2022 (Dian Saraswati)
20. LEN-SEA Regional Convening, Filiphina, ''sharing of best practices on legal empowerment'' –Oktober 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
21. Grand Opening 16HAKTP Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diskusi Publik: Perempuan Dan Kesetaraan –November 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
22. Grand Closing UI Gerak Bersama, Strategi Pencegahan dan Penanganan KS dalam Internal Organisasi''-- September 2022, Fakultas Hukum UI (Bestha Inatsan Ashila)
23. Grand Training Hope Helps Nasional – September 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
24. Sharing Kelompok Studi Hukum Islam Internal Development, Fakultas Hukum UNDIP – November 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
25. Bimbingan teknis Pedoman Kejaksaan No. 1/2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana – Makassar (Kharisanty Soufie, Marsha Maharani, Naomi R. Barus, Muhammad Rizaldi W, Adery Ardhan Saputro)
26. The 4th international conference on library, archives, and information sciences (ICOLAIS 2022) FIB UI – Oktober 2022 (Neka Rusyda Supriatna)
27. Diskusi Klinik Etik STIH Jentera – Agustus 2022 (Muhammad Rizaldi W)
28. Diskusi Indikator Pemberian Penghargaan KKRI kepada pegawai Kejaksaan RI yang berprestasi (Muhammad Rizaldi W)
29. Penyusunan Kebijakan Internal Polri terkait Penanganan Kasus PBH" - Komnas Perempuan – Nov 2022(Muhammad Rizaldi W)
30. Public Campaign: Peran Dirjen Badilmiltun dalam Menjaga Integritas Aparatur di Lingkungan Badilmiltun MA RI – Nov 2022 (Muhammad Rizaldi W)
31. Talkshow Mengurai Benang Kusut Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual dalam rangka Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) (Andreas Nathaniel Marbun)
32. Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak di DKI Jakarta oleh LBH APIK (Naomi R. Barus)
33. Webinar 16 HAKBG Keadilan Restoratif dan Penanganan Kasus KBGO – Desember 2022 (Naomi R. Barus)
34. PUBLIK STAND-IN (Distinguishing 16 Days Of Activism Against Gender-Based Violence) – November 2022 (Naomi R. Barus)
35. "Peran Aktivisme Digital Organisasi Gerakan Sosial di Indonesia (2016-2021) – Nov 2022 ((Naomi R. Barus)
36. RJ di KS sebagai pemulihan dalam UU TPKS di acara gender studies forum 2022 - (Naomi R. Barus)
37. Seminar Gender Justice Group (Legal Empowerment Network-South East Asia) :Mainstreaming Gender Equality In The Judiciary And Legal Empowerment Work, – Juni 2022 – (Bestha Inatsan Ashila)
38. Diskusi SAPDA, Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 "Menegakkan Keadilan Bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum" – Maret 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
39. Bimtek Kejaksaan Pedoman 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana, Batam,Februari 2022 (Kharisanty Soufie, Marsha Maharani, M Rizaldi W , Adery Ardhan Saputro)
40. Diskusi internal LBH APIK ''Memastikan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana melalui Penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021'' – Juni 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
41. Kontroversi dispensasi perkawinan dalam Pertemuan Mitra Power To Youth, Rutgers 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
42. Diskusi Online Kekerasan Seksual PPI Australia– Januari 2022 (Bestha Inatsan Ashila)
43. Refleksi renaksi OGI isu Justice (Dio Ashar Wicaksana)
44. Iluni FHUI: revisi hukum acara perdata – (Dio Ashar Wicaksana)
45. Mainstreaming Gender Justice in Judiciary – (Dio Ashar Wicaksana)
46. Kilas Balik hubungan kepolisian dan Kejaksaan – Jentera (Adery Ardhan Saputro)
47. Tinjauan Umum Harmonisasi delik di RKUHP – (Adery Ardhan Saputro)
48. Online Lecture Series- Leiden Law school-persada Brawijaya – (Adery Ardhan Saputro)
49. Launching Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Narkotika OSF (Matheus Nathanael Siagian dan Andreas Nathaniel Marbun)

50. Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum" – Agustus 2022 (Matheus Nathanael Siagian)
51. Workshop Pedoman No. 1 Tahun 2021 untuk paralegal – Maret 2022 (Naomi R. Barus, Kharisanty Soufie, Marsha Maharani, Muhammad Rizaldi W)
52. LBH APIK JAKARTA: Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak korban Kekerasan melalui Implementasi Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Naomi R. Barus)
53. Webinar IJRS: Esa Hilang Dua Terbilang: Menguji Kolaborasi Payung Hukum Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Marsha Maharani)
54. webinar International Women's Day IJRS: Urgensi Pengesahan RUU TPKS sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (Marsha Maharani)

D. IJRS dalam Media Massa

1. Pakar Menjawab: Alasan mengapa hukuman mati tidak efektif dan harus dihentikan, terlepas apapun kasusnya – The Conversation (Dio Ashar Wicaksana)
2. Justice deterred is justice denied for Indonesia's victims of crime – GovInsider (Dio Ashar Wicaksana)
3. Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi : Bagaimana pendekatan keadilan restorative sangat merugikan korban kekerasan seksual – – The Conversation – (Dio Ashar Wicaksana dan Marsha Maharani)
4. Opini di Kawan Hukum (Larangan Perkawinan beda agama di Indonesia, penyelundupan hukum jalan keluarnya) –(Arianda Lastiur Paulina)
5. Opini di The Conversation (Sextortion bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban tapi payung hukumnya masih lemah)- (Arianda Lastiur Paulina)
6. Narasumber VOA (Voice of America) The Other #MeToo: Pria Bisa Jadi Korban Kekerasan Seksual (Bestha Inatsan Ashila)
7. Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya? Dalam Wawancara The Conversation – (Arsa Ilmi Budiarti dan Bestha Inatsan Ashila)
8. Pakar Menjawab: UU TPKS sudah sah! Apa yang patut dirayakan dan apa yang kurang? (Arsa Ilmi Budiarti)
9. Opini di The Conversation: Hambatan Orang dengan HIV AIDS Saat Mengalami Masalah Legal Pentingnya Peran Pendamping Hukum dan Non Hukum (Gladys Nadia Arianto dan Bestha Inatsan Ashila)
10. Podcast The Conversation: Saat Anak Muda Terjerat Suap – (Andreas Nathaniel Marbun)
11. The Conversation : Pejabat dengan kekayaan tak wajar tidak bisa dipidana: salah siapa? (Andreas Nathaniel Marbun)
12. dikutip dalam artikel Tirto berjudul 10 Persen Pelaku KS Masih Anak-Anak, IJRS: Perlu Pendidikan Seks – (Marsha Maharani)
13. dikutip dalam artikel Tirto berjudul IJRS: Hanya 0,1 Persen Korban Kekerasan Seksual Ajukan Restitusi (Marsha Maharani)
14. SOP Kekerasan Polisi, Progresif tapi Kenapa Penerapannya Memble? Magdalene (Marsha Maharani dan Bestha Inatsan Ashila)
15. Negara gagal melindungi anak perempuan di lingkungan terdekat mereka bersama The Conversation – (Marsha Maharani)
16. Diwawancarai dalam artikel: Data Bicara: negara gagal lindungi mayoritas korban yang alami kekerasan seksual di lingkungan terdekat – (Marsha Maharani)
17. Narasumber dalam wawancara Narasi TV: Setelah UU TPKS disahkan, muncul pertanyaan: Siapa aja, sih, yang paling banyak melakukan kekerasan seksual dan gimana hukumannya selama ini? – (Marsha Maharani)
18. Narasumber dalam Diskusi Twitter Space #KawalRKUHP ICJR dan Rumah Cemara (Marsha Maharani)

#DiscoveringJustice

IJRS
Indonesia Judicial Research Society

lifeatIJRS

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

www.ijrs.or.id

offi e@ijrs.or.id

+62 821 2500 8141

@ijrs_official

@ijrs_official

IJRS TV